

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA AKUTANSI PEMERINTAH
LAKIP 2023



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPULIK INDONESIA MEDAN
Jl. Gatot Subroto No 214 KM 5,5 Medan.Sumatera Utara
Nomor Telp. 061-8463116 Nomor Fax.061 -8463116
Email :set.rrimedan@rri.go.

SAMBUTAN KEPALA

LPP RRI MEDAN

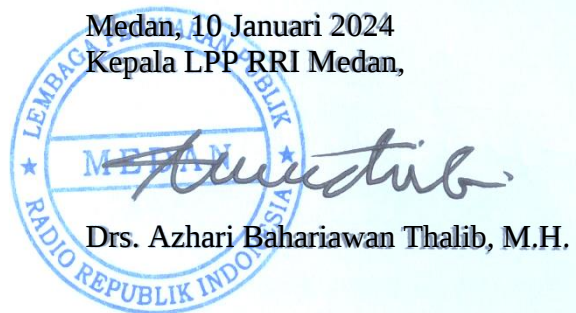
Tahun 2023 telah berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja sepanjang tahun 2023, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja, Setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja (LAKIP). LAKIP disusun secara sistematis dan terukur, agar mampu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel atas kinerja pemerintah berikut hasil-hasil yang dicapainya.

LPP RRI Medan sebagai institusi pemerintah di bawah LPP RRI, tentu berkewajiban pula dalam hal penyusunan LAKIP tersebut. Sebagai suatu organisasi, LPP RRI Medan memiliki arah tujuan yang tergambar dari Rencana Strategis yaitu: Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance* khususnya di wilayah layanan siaran RRI Medan yaitu wilayah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun.

Pada LAKIP 2023 ini, LPP RRI Medan memberikan gambaran yang konprehensif atas tercapainya target kinerja utama yang dicerminkan dengan pencapaian target IKU, maupun kinerja lainnya yang berupa prestasi dan inovasi di sepanjang tahun 2023.

Pada akhirnya, LAKIP LPP RRI Medan 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dan berkualitas di masa mendatang.

Medan, 10 Januari 2024
Kepala LPP RRI Medan,



Drs. Azhari Bahariawan Thalib, M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPP RRI Medan disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX /6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP LPP RRI Medan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju LPP RRI Medan yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang.

Adapun capaian yang dihasilkan oleh LPP RRI Medan di tahun 2023 sebagai berikut: Dalam tahun 2023 LPP RRI Medan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 Program/Kegiatan dengan 20 indikator kinerja/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dalam RENSTRA dan perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Dirut LPP RRI.

Adapun indikator kinerja satker LPP RRI Medan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Satker pada semester 1 tahun 2023 untuk adalah sebagai berikut :

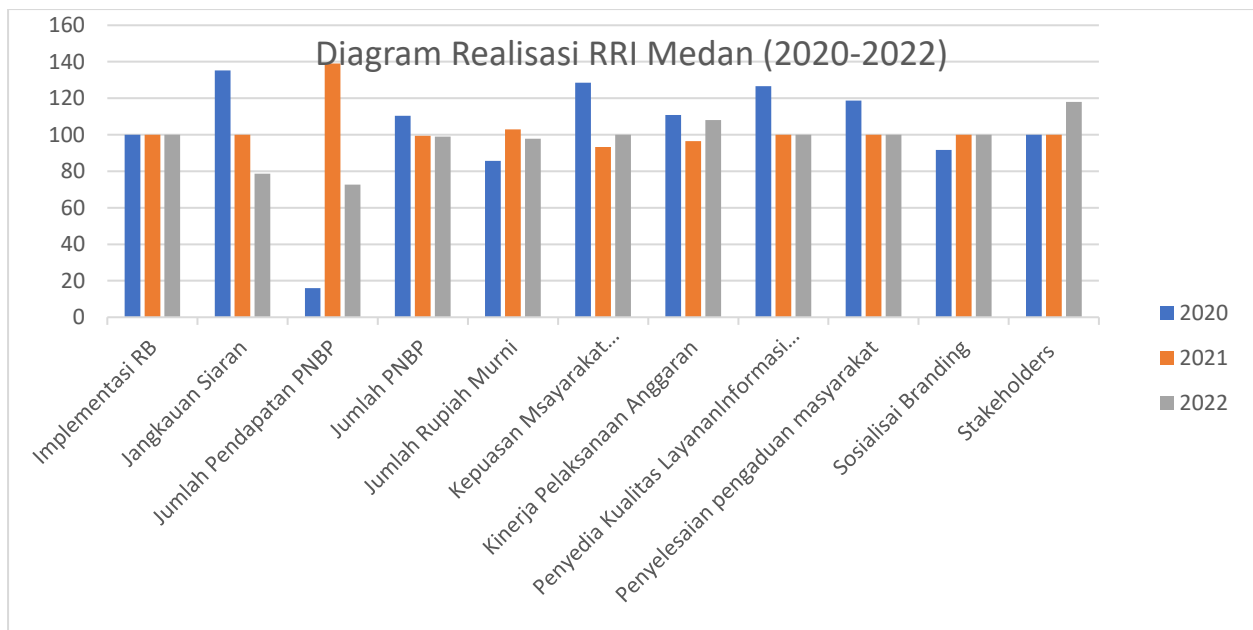
1. Respon Time atas pengaduan pendengar/masyarakat 100.00 %
2. Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA) 95,16 %
3. Pendapatan PNPB (Sesuai Target yang tercantum dalam DIPA) 22.19 %
4. Prosentase pembuatan SKP pegawai 100 % dari jumlah pegawai 98 %
5. Jumlah Program Brand Comunication Kegiatan 94.23 %
6. Optimalisasi Pengelolaan Konten Media Digital 100 %
7. Jangkauan Siaran berbasis populasi 68% %
8. Jaminan Kinerja Layanan seluruh Platform RRI (terrestrial dan Digital) 85%
9. Peningkatan nilai kualitas arsip B Nilai RB B 100 %
10. Penilaian evaluasi pelaksanaan anggaran (SMART DJA) 69,61 %
11. Tingkat Penyerapan Anggaran 57,46 %
12. Penurunan Jumlah Temuan Audit(<5Item) 100 %
13. Prosentase pengamanan asset 100 % dari jumlah asset 100 %
14. Presentase penyelesaian administrasi aset melalui
sertifikasi kepemilikan 100 % dari ketepatan waktu penyampaian 100 %
15. Penyelesaian kasus-kasus asset tertangani 100 %

16. Presentase upload dokumen yang berkaitan dengan hukum pada website JDIH 100 % dokumen yang terupload 100 %
17. Presentase dokumen/arsip yang digitalisasi dokumen yang didigitalisasi 100 %
18. Presentase pengadaan barang/jasa yang melalui e-katalog/Belanja
Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan) 2 Paket pengadaan 0.00 %
19. Peningkatan Kualitas Konten dan kemasan program Jumalistik dan Artistik sebagai pemenuhan kebutuhan atas informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T, berkebutuhan khusus, kaum rentan, dan kaum minoritas 90 Persentase kesesuaian dengan P3SPS berdasarkan sasaran publik/ segmentasi 100 %
20. Presentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya 100 % dari jumlah pegawai 100%

Dari Indikator Perjanjian kinerja satker secara umum pencapaian tujuan sasaran yang tertuang di dalam perjanjian kinerja memperoleh hasil sebesar 84,44% dengan predikat Sangat Baik, data ini dapat dari hasil pengelolaan kinerja yang di input di Aplikasi Simlakin (Sistem Informasi laporan Kinerja) yang dibuat oleh Kantor Pusat LPP RRI, Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh satker LPP RRI baik di Pusat maupun di daerah untuk mengukur kinerja satker dengan dilampirkan bukti evidennya sebagai dasar evaluasi kinerja dari tim APIP SPI. Bila kita banding data capaian kinerja RRI Medan dari tahun 2020 dengan 2022 dapat lihat pada tabel realisasi berikut ini:

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2020	2021	2022
1	Implementasi RB	100	100	100
2	Jangkauan Siaran	135,29	100	78,65
3	Jumlah Pendapatan PNB	16,03	139	72,65
4	Jumlah PNB	110,33	99,5	99
5	Jumlah Rupiah Murni	85,65	103	97,9
6	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	128,57	93,3	100
7	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	110,84	96,47	108
8	Penyedia Kualitas Layanan Informasi Publik	126,67	100	100
9	Penyelesaian pengaduan masyarakat	118,75	100	100
10	Sosialisai Branding	91,67	100	100
11	Stakeholders	100	100	118
NILAI		92.11	99.32	97.80%

Tabel 01 Realisasi Kinerja Satker RRI Medan
(Berdasarkan data dari aplikasi SIMLAKIN (2020-2022))



Gambar 01. Diagram batang Realisasi Kinerja satker 2020-2022

Secara keseluruhan capaian kinerja LPP RRI Medan memenuhi target yang ditetapkan Dirut, dan bila dibandingkan dengan tahun lalu Capaian Kinerja LPP RRI Medan meningkat dari capaian kinerja 2020 sebesar 92,11 % meningkat menjadi 97,80 % ada kenaikan sebesar 5.69% dengan predikat capaian kinerja adalah “Memuaskan”. Bila dilihat pada grafik diatas terdapat kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan mulai tahun 2020 yaitu pada pendapatan negara bukan pajak yang mengalami kenaikan, pada tahun 2020 PNPB dengan target 449.248.349 pencapaian PNPB Rp 72.000.000, tahun 2021 PNPB dengan Target Rp500.000.000,- pencapaian PNPB Rp 698.797.240 mendapatkan peningkatan Rp 198.797.240,- pada tahun 2022 PNPB RRI Medan dengan target Rp 1.737.950.000,- pencapaian PNPB 1.263.101.745,- mendapatkan kekurangan target sejumlah Rp. 474.848.255,- bila dibandingkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan pendapatan PNPB sejumlah Rp 564.304.505. Hal tersebut disebabkan karena kondisi pandemi yang mulai membaik sehingga aktivitas di masyarakat juga mulai meningkat, selain itu pada Tahun 2022 terdapat pendapatan dari penggunaan sarana prasarana sesuai dengan Tusi. Sedangkan di tahun 2023 terjadi penurunan pencapaian PNPB dengan target Rp 840.140.000 pencapaian PNPB Rp 278.285.000 hanya 33.12% dari target yang ditentukan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh karena adanya recofusing dari anggaran mereka dan anggaran mitra tidak untuk anggaran PNPB.

Secara keseluruhan bila dilihat dari target PNPB yang telah ditetapkan, PNPB LPP RRI Medan baik tahun 2020 maupun 2023 masih jauh dari target. Kedepan kinerja yang belum optimal akan dievaluasi dan segera dibuat RATL rencana aksi tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerjanya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
3. Isu Strategis	4
4. Landasan Hukum.....	5
5. Sistematika.....	6
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
1. Uraian Singkat Renstra.....	7
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	8
a. Perjanjian Kinerja Semester 1.....	8
b. Perjanjian Kinerja Semester 2.....	9
BAB III.....	11
AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja	12
2. Manajemen Perubahan.....	14
3. Penguatan Pengawasan Monitoring Dan Evaluasi	15
4. Penguatan Akuntabilitas Kerja	15
5. Penguatan Kelembagaan	15
6. Penguatan Tata Laksana.....	16
7. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	16
8. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	17
9. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	17
2. Jangkauan Siaran Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI	18
a. Jangkauan Siaran.....	18
b.1 Konten Siaran secara Terrestrial	20

3. Jumlah Pendapatan PNB (LPU)	25
5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Keuangan).....	26
a. Pagu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	26
a. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	28
c. Kinerja Keuangan.....	29
1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	29
2. E-Monev Bappenas	30
BAB IV	33
PENGHARGAAN	33
Bidang Siaran dan Pemberitaan	33
Bidang TU	33
Bidang LPU	33
BAB V	34
PENUTUP	34
1.Tantangan Bidang Siaran :	35
2.Tantangan Bidang LPU	35
3.Tantangan Bidang TMB.....	36
4.Tantangan di Bidang Pemberitaan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Diagram batang Realisasi Kinerja satker 2020-2022.....	iv
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satker LPP RRI.....	3
Gambar 1. 2 Data Pegawai Satker per 31 Desember 2023	4
Gambar 1. 3 Data Pegawai Tetap dan Tidak Tetap RRI Medan per 31 Desember 2023	4
Gambar 3. 1 Nilai Akhir SimLakin 2020-2022.....	12
Gambar 3. 2 Jangkauan Siaran Programa 1 94.3 FM.....	18
Gambar 3. 3 Jangkauan Siaran Programa 2 92.4 FM.....	19
Gambar 3. 4 Jangkauan Siaran Programa 4 88.4 FM.....	20
Gambar 3. 5 Pelayanan RRI Medan.....	21
Gambar 3. 6 Keramahan Petugas dalam Melayani	21
Gambar 3. 7 Acara Programa 1	22
Gambar 3. 8 Acara Programa 2.....	22
Gambar 3.9 Acara Programa 4.....	23
Gambar 4.0 Follower Programa 1 di RRI Digital dan Media Sosial	24
Gambar 4.1 Follower Programa 2 di RRI Digital dan Media Sosial	24
Gambar 4.2 Follower Programa 4 di RRI Digital dan Media Sosial	24
Gambar 3. 11 Realisasi Belanja Satker tahun 2023	28
Gambar 3. 16 Laporan E-Monev Tahun 2023	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis LPP RRI.....	5
Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan.....	6
Table 2.1 Perjanjian Kinerja semester 1 (Data berdasrkan Sisporja).....	9
Table 2.2 Perjanjian Kinerja Semester 2 (data realisasi berdasarkan dari data Sisporja).....	10
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	11
Tabel 3. 2 Jumlah Pendapatan PNBP LPU	25
Tabel 3. 3 Persebaran Perubahan Pagu Anggaran LPP RRI Medan.....	27
Tabel 3. 4 Rincian Pagu Anggaran RRI Medan Tahun 2023.....	27
Tabel 3. 5 Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	30
Tabel 3. 6 Pendekatan E-Monev dalam kerangka logika.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	37
Lampiran 2	37
Lampiran 3	37

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, LPP RRI (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Lembaga sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan lembaga, capaian tujuan dan sasaran lembaga yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP LPP RRI khususnya LAKIP Direktorat Keuangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Keuangan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja Direktur Keuangan LPP RRI.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Unit Organisasi Satker memiliki mekanisme kerja sebagai berikut:

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap satuan kerja terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas satuan kerja atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim.

Mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat Level 2. Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola dan sumber daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada.

Adapun mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan di antaranya:

- a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1.
- b. Penyusunan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

2. Tahapan Pelaksanaan

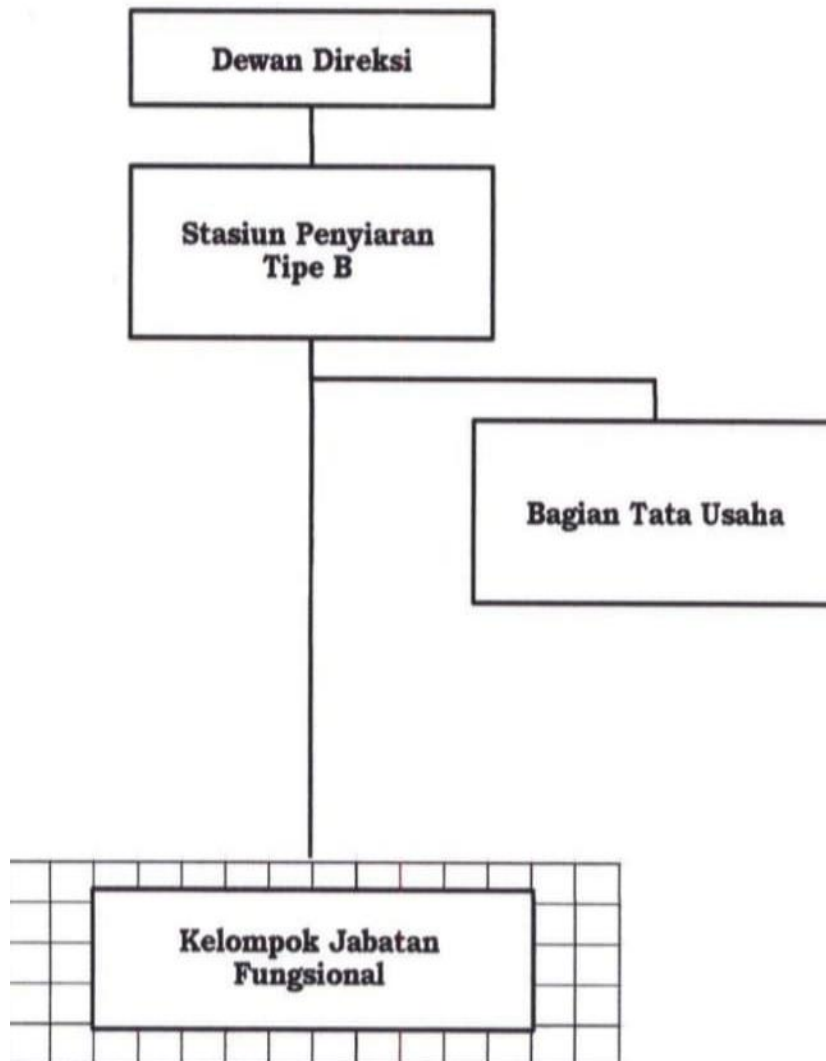
Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

- a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- b. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim.
- c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2.

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Struktur Organisasi LPP RRI Medan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

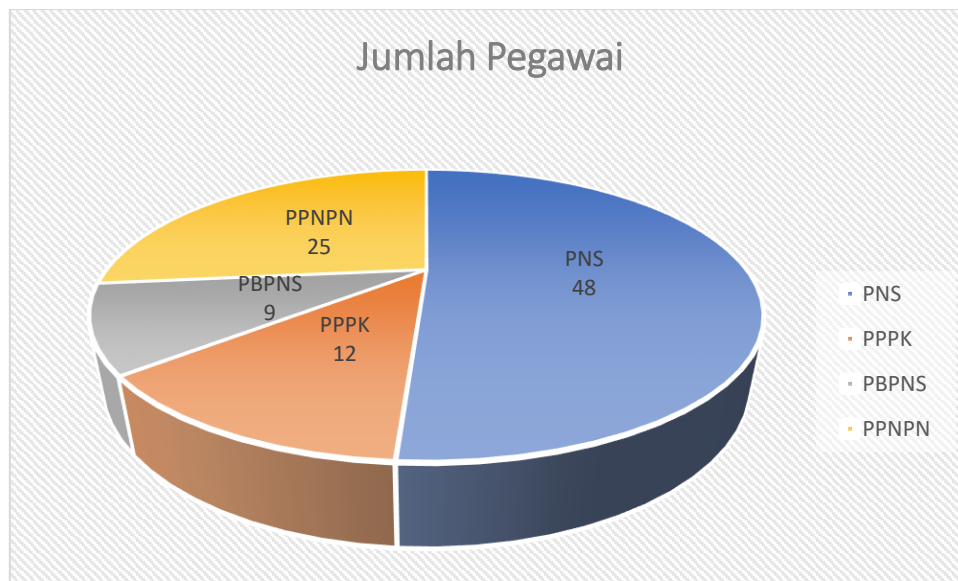


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satker LPP RRI

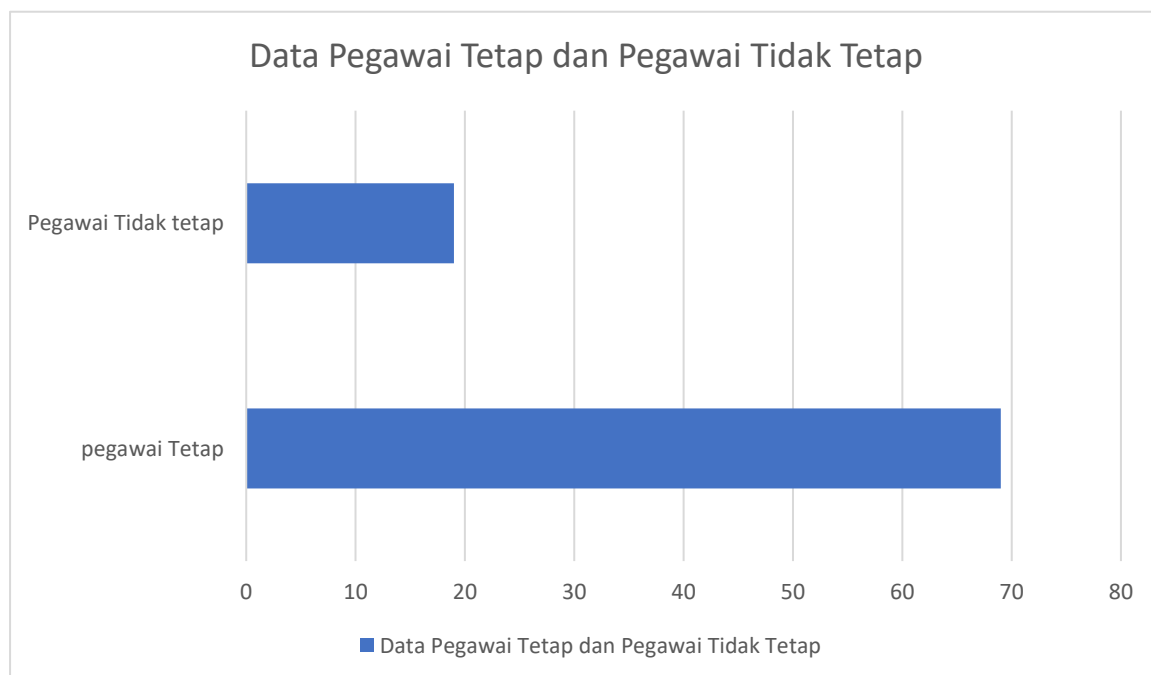
Satker terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Untuk mendukung program penyederhanaan birokrasi, dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, sekaligus untuk mendorong proses tata laksana pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menciptakan iklim budaya baru pelayanan publik yang lebih baik khususnya untuk perbaikan di Unit Organisasi Satker.

Sistem kerja paska penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari Direktur Utama dan/atau Direktur Keuangan di mana Direktur Utama dan Direktur Keuangan memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada.

Dalam mendukung kegiatan di Satker, berikut lampiran data pegawai dan sarana prasarana yang berada di Satker LPP RRI Medan:



Gambar 1. 2 Data Pegawai Satker per 31 Desember 2023



Gambar 1. 3 Data Pegawai Tetap dan Tidak Tetap RRI Medan per 31 Desember 2023

3. Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan

dicapai secara nyata oleh LPP RRI, yakni Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance*. Sasaran Strategis LPP RRI dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip <i>good public governance</i>	1. Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio 2. Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip <i>good public governance</i>

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis LPP RRI

4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Satker LPP RRI ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker LPP RRI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Satker, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENGHARGAAN
	Meliputi Penghargaan yang diterima LPP RRI Medan Periode Januari – Desember 2023
BAB V	PENUTUP
	Meliputi rangkuman capaian kinerja tahun 2023, perbandingan kinerja tahun 2021 dan 2023 dan rencana tindak lanjut ke depan terkait peningkatan kinerja satker

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan arah dan kebijakan LPP RRI 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai program dan kegiatan dirancang dan dirumuskan selaras dan terintegrasi dengan upaya RRI dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PN). Dokumen ini menjadi pedoman bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Yang Terpercaya dan Mendunia, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip *good public governance*, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Menjadikan RRI sebagai media utama dalam peningkatan literasi masyarakat dan radio rujukan pengetahuan yang aktual, faktual dan kredibel, melalui peningkatan kualitas isi/program siaran. Konten yang disiarkan akan selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis riset, sehingga selain berkualitas juga dapat menjadi sumber wawasan pengetahuan baru.
2. Menjadikan RRI sebagai media rujukan utama berita dan informasi yang akurat, netral, independen, dan objektif.
3. Menjadi radio publik yang terdepan terkait konten-konten kebudayaan dalam rangka membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran, melalui optimalisasi program khusus budaya, Programa 4 (Pro-4) dengan tagline “Ensiklopedi budaya keindonesiaan”.
4. Melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan transformasi digital dalam penyiaran radio dengan memanfaatkan infrastruktur TIK dalam meningkatkan layanan informasi dan hiburan berbasis multiplatform, serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.
5. Menjadi radio tanggap bencana sebagai media rujukan utama mitigasi bencana. Strategi ini kedepannya akan menjadikan RRI sebagai media EWS dan sarana literasi tanggap bencana bagi masyarakat. Salah satunya dengan merancang dan melaksanakan program siaran khusus mitigasi bencana melalui acara siaran Radio Tanggap Bencana “KENTONGAN” di RRI seluruh Indonesia.
6. Memperkuat dan meningkatkan peran Stasiun Siaran Luar Negeri RRI sebagai radio diplomasi bangsa (*second track diplomacy*), melalui layanan siaran dalam 9 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol, guna mendukung program prioritas nasional dalam “Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri”.

7. Mewujudkan tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta berorientasi pelayanan.

Strategi yang ditetapkan dalam Renstra LPP RRI 2020-2024 dalam rangka mendukung 4 (empat) agenda pembangunan nasional yang menjadi acuan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam menjalankan peran dan fungsinya, meliputi: (1) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; (2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (4) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdiri atas 2 Perjanjian Kinerja yaitu:

a. Perjanjian Kinerja Semester 1

NO	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Tahunan
1	Respon Time atas pengaduan pendengar/masyarakat	<5 Hari Kerja	0	100.00 %
2	Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA)	95 %	95	100.00 %
3	Pendapatan PNB (Sesuai Target yang tercantum dalam DIPA)	840.180.000 Rupiah	Rp. 186.410.000	22.19 %
4	Prosentase pembuatan SKP pegawai	100 % dari jumlah pegawai	100	100%
5	Jumlah Program Brand Comunication	52 Kegiatan	54	103.85 %
6	Optimalisasi Pengelolaan Konten Media Digital	100 %	100	100 %
7	Jangkauan Siaran berbasis populasi	92 %	65	70.65 %
8	Jaminan Kinerja Layanan seluruh Platform RRI (terrestrial dan Digital)	95 %	95	100 %
9	Peningkatan nilai kualitas arsip	Nilai RB B	B	B
10	Penilaian evaluasi pelaksanaan anggaran (SMART DJA)	95 Nilai	96	101.05 %
11	Tingkat Penyerapan Anggaran	95 %	10.09	10.53 %
12	Penurunan Jumlah Temuan Audit	<5 Jumlah Item	0	100%
13	Prosentase pengamanan asset	100 % dari jumlah asset	100	100%

14	Presentase penyelesaian administrasi aset melalui sertifikasi kepemilikan	100 % dari ketepatan waktu penyampaian	100	100%
15	Penyelesaian kasus-kasus aset	100 % tertangani	100	100%
16	Presentase upload dokumen yang berkaitan dengan hukum pada website JDIH	100 % dokumen yang terupload	100	100%
17	Presentase dokumen/arsip yang digitalisasi	100 % dokumen yang didigitalisasi	100	100%
18	Presentase pengadaan barang/jasa yang melalui e-katalog/Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan)	2 Paket pengadaan	0	0
19	Peningkatan Kualitas Konten dan kemasan program Jumalistik dan Artistik sebagai pemenuhan kebutuhan atas informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T, berkebutuhan khusus , kaum rentan, dan kaum minoritas	90 Persentase kesesuaian dengan P3SPS berdasarkan sasaran publik/segmentasi	90	100%
20	Presentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100 % dari jumlah pegawai	100	100%
Nilai Akhir				80.81

Table 2.1 Perjanjian Kinerja semester 1 (Data berdasarakan Sisporja)

b. Perjanjian Kinerja Semester 2

NO	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Tahunan
1	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100 %	100	100.00 %
2	Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100 %	100	100.00 %
3	Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52	39	75.00 %
4	Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker	26	58	223.08 %
5	Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas local	52	47	90.38 %
6	Jumlah siaran program tanggap bencana	52	34	65.38 %
7	Jumlah siaran berjaringan satker	365	286	78.36 %
8	Persentase Realisasi PNPB	60%	19.86	33.12%

9	Nilai IKPA	95	95	100
10	Nilai Kinerja Anggaran	95	96	101.05 %
11	Jumlah dokumen risk register satker	1	1	100%
12	Penilaian kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif		Informatif
13	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100	100	100%
14	Jumlah konten yang diupload di medsos official	400	340	85.00 %
15	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas	Puas	Puas
16	Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92	62	67.39 %
17	Nilai SPIP Terintegrasi	3	1	33.33%
18	Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100	100	100%
19	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	100
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja	65	60	92.31 %
	Nilai Akhir			86.92

Table 2.2 Perjanjian Kinerja Semester 2 (data realisasi berdasarkan dari data Sisporja)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi Amanah. selaku pengemban amanah Direktur Keuangan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker LPP RRI MEDAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi LPP RRI .

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

No	Kategori	Rata-rata % Capaian
1	Sangat memuaskan	$100 \leq X \leq 120$
2	Memuaskan	$90 \leq X \leq 100$
3	Sangat Baik	$80 \leq X \leq 90$
4	Baik	$70 \leq X \leq 80$
5	Cukup	$60 \leq X \leq 70$
6	Kurang	$X < 60$

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, LAKIP LPP RRI Medan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja LPP RRI Medan dan Indikator Kinerja Utama atau Indikator Program/Kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja

Direktur Utama LPP RRI menentukan apa s menjadi kinerja utama dari Satker LPP RRI, dimana kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam hal ini yang terlihat pada indikator Program/Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Satker LPP RRI. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas IKU Satker menunjukkan hasil sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2020	2021	2022
1	Implementasi RB	100	100	100
2	Jangkauan Siaran	135,29	100	78,65
3	Jumlah Pendapatan PNBP	16,03	139	72,65
4	Jumlah PNBP	110,33	99,5	99
5	Jumlah Rupiah Murni	85,65	103	97,9
6	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	128,57	93,3	100
7	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	110,84	96,47	108
8	Penyedia Kualitas Layanan Informasi Publik	126,67	100	100
9	Penyelesaian pengaduan masyarakat	118,75	100	100
10	Sosialisai Branding	91,67	100	100
11	Stakeholders	100	100	118
NILAI		92.11	99.32	97.80%

Gambar 3. 1 Nilai Akhir SimLakin 2020-2022

(Sumber Aplikasi SimLakin)

Adapun penjabaran tiap indikator kinerja yang dihasilkan oleh LPP RRI Medan, dapat kami jabarkan di bawah ini:

1. Implementasi RB

Reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi reformasi birokrasi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Pelayanan publik dari pemerintah menjadi hal yang sangat diperhatikan saat ini. Masyarakat sangat mengharapkan kontribusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya secara efektif, efisien, profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah mulai melakukan berbagai program pengelolaan pemerintah. Perkembangan pengelolaan pemerintah ini dilakukan agar mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang baik menuju kondisi *good governance* dalam pengelolaan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* adalah program reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam program ini dilakukan berbagai penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Hadirnya program reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi.

RRI Medan sebagai RRI kategori stasiun Penyiaran Tipe B dalam menerapkan program Reformasi Birokrasi dan guna terwujudnya Visi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia, melakukan proses perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan, penerapan upaya tersebut tidak luput dari kekurangan sehingga perlu adanya evaluasi guna melakukan penyempurnaan di tahun selanjutnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam program reformasi birokrasi pemerintah terdapat 8 (delapan) area perubahan yaitu:

1. Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

b. Tata laksana

Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

c. Sumber daya manusia aparatur

SDM aparatur berintegrasi, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera

- d. Peraturan perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
- e. Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- f. Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- g. Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Dalam melakukan reformasi birokrasi di RRI Medan, telah dibentuk kelompok-kelompok kerja yang difokuskan pada 8 (delapan) area perubahan. Kelompok kerja ini merupakan bagian dari tim reformasi birokrasi yang terdiri dari tim pengarah, Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat. Penetapan tim reformasi birokrasi LPP RRI Medan ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala RRI Medan Nomor: B-45/RRI-Mdn/OT.01.02/11/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Medan. Tim reformasi birokrasi ditugaskan untuk merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi dalam rangkaian-rangkaian pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakannya dengan baik.

2. **Manajemen Perubahan**

Dari rencana aksi yang di susun oleh Tim Reformasi Birokrasi, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Medan, dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala RRI Medan Nomor: B-45/RRI-Mdn/OT.01.02/11/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Medan.
2. Menetapkan Agen Perubahan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan RRI Medan, dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala RRI Medan Nomor: 14/RRI-MDN/KEP/01/2022 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Sebagai Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan RRI Medan.
3. Melakukan pertemuan rapat antar Pokja RB seperti penyusunan rencana aksi Pokja RB, evaluasi rencana aksi dan lain-lain di lingkungan RRI Medan
4. Melakukan publikasi informasi tentang aktivitas Reformasi Birokrasi RRI Medan baik di Medsos (FB, Twitter, Instagram) maupun melalui banner/flyer yang di tempatkan pada ruangan kerja.
5. Menetapkan kegiatan penegakan disiplin pegawai berupa Upacara Bendera dan Apel mingguan.

Dalam penerapan Disiplin pegawai dan peningkatan loyalitas kepada Bangsa dan Negara serta lembaga, LPP RRI Medan menerapkan kegiatan Upacara Bendera serta Apel yang diwajibkan kepada seluruh pagawainya untuk mengikutinya. Adapun Kegiatan nya sebagai berikut :

- a. Upaca Bendera pada Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI
- b. Upacara Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 tiap bulannya
- c. Apel Pagi Disiplin Pegawai di hari senin setiap minggu

3. Penguatan Pengawasan Monitoring Dan Evaluasi

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Pengawasan Monitoring dan Evaluasi, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dan penerapan untuk Pembangunan dan Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan RRI Medan.
2. Peningkatan efektifitas penanganan dan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan RRI Medan, berdasarkan data LHKPN dan LHKASN yang telah masuk pada bagian SDM, dapat diketahui bahwa seluruh pegawai RRI Medan sudah menyelesaikan kewajibannya menyerahkan laporan harta kekayaannya untuk periode 2023.
3. Pengelolaan data dan tindaklanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan siaran maupun layanan lainnya yg diberikan RRI Medan.
4. Sosialisasi *wistleblowing system* secara internal dilingkungan RRI Medan.

4. Penguatan Akuntabilitas Kerja

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan Akuntabilitas Kerja, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah RRI Medan, melalui pematapan implementasi SAKIP RRI Medan
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual RRI Medan, dalam pencatatan di neraca dan laporan Keuangan RRI Medan selalu menerapkan basis akrual.
3. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas guna mewujudkan belanja Negara RRI Medan yang berkualitas, dalam pembuatan anggaran RKAKL, TOR dan RAB selalu meminta masukan dari semua pejabat struktural melalui rapat khusus membahas anggaran RKAKL tahun depan, dengan memasukkan program-program kerja tahun yang akan datang sehingga tidak ada lagi pendapat pegawai struktural yang mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAKL.
4. Penyusunan pelaporan Asset BMN LPP RRI Medan secara Akurat dan Akuntabel, Penyusunan pelaporan asset BMN selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan di bawahnya sehingga pelaporan Asset BMN LPP RRI Medan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Penguatan Kelembagaan

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan Kelembagaan, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Optimilisasi peran PPID RRI Medan, Pokja Penguatan kelembagaan berkoodinasi dengan Koordinasi Bidang LPU dan Manajemen RRI Medan berdiskusi untuk penguatan peran PPID RRI Medan dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal.

2. Melakukan evaluasi tugas, fungsi dan kewenangan dilingkungan RRI Medan, disetiap rapat struktural setiap bulannya, manajemen RRI Medan selalu mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai dalam rangka penilaian pemberian Tunjangan kinerja pegawai dan uang makan, agar besaran Tukin sesuai dengan prestasi kerja dan kehadiran pegawai baik masuk maupun pulang kantor.
3. Melakukan Review SKP pegawai RRI Medan Agar SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang di buat rutin setiap awal tahun, sesuai dengan target tupoksi yang diberikan oleh atasan langsung kepada yang bersangkutan, maka Manajemen RRI Medan bersama dengan Pokja Penguatan kelembagaan melakukan kegiatan Review SKP Pegawai, dengan kegiatan Review ini diharapkan SKP yang dibuat oleh masing-masing pegawai tepat sasaran, dan melalui SKP kinerja pegawai dapat di ukur setiap bulannya, sehingga pada waktu penilaian SKP setiap triwulannya dapat obyektif dan sesuai dengan kinerja pegawai.

6. Penguatan Tata Laksana

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan Tata Laksana, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi sistem arsip dinamis kepada Karyawan RRI Medan, Pokja penguatan tata laksana RRI Medan sedang mempersiapkan bahan sosialisasi sistem arsip dinamis berkaitan dengan penyimpanan arsip dan data-data penting yang dimiliki RRI Medan.
2. Penguatan penerapan *business process e-procurement* di lingkungan RRI Medan, Pokja penguatan tata laksana bersama manajemen sedang merencanakan penerapan *business process e-procurement* dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa RRI Medan.
3. Penguatan penerapan mekanisme dan aturan main/tata laksana dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan RRI Medan, setiap pengadaan barang dan jasa selalu menerapkan aturan main tata laksana pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan Presiden terbaru.
4. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan RRI Medan, dari setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan RRI Medan selalu di evaluasi dan dimonitoring berkaitan dengan proses pengadaan dan penentuan harga pengadaan.

7. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dari rencana aksi yang di susun oleh Pokja Penguatan sistem Manajemen SDM Aparatur, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menjadwalkan rapat bulanan, mingguan kepada jajaran Manajemen RRI Medan yang terdiri dari Kepala Stasiun, Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim dari masing – masing Seksi.
2. Menjadwalkan kegiatan olah raga senam atau jalan sehat di hari jumat setiap minggu pertama, kedua, ketiga dan ke empat

3. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi RRI Medan, melalui penetapan SKP masing-masing Bidang / bagian yang telah ditetapkan atasan langsung hasil kesepakatan antara atasan dan bawahannya.
4. Peningkatan kualitas SDM RRI Medan melalui peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, dengan cara melakukan Tim Building RRI Medan setelah kegiatan evaluasi program siaran RRI Medan.
5. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan *Rewards* dan *Punishment* berbasis kinerja dilingkungan RRI Medan, memberikan *Rewards* kepada Pegawai yang berprestasi dan memberikan *punishment* kepada yang melanggar baik berupa hukuman ringan seperti tegoran lisan, tegoran tertulis tergantung tingkat pelanggaran, hukuman sedang bahkan hukuman berat sesuai dengan ketentuan PP no. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
6. Melakukan penyusunan SKP individu yang dikaitkan dengan Sasaran Kinerja Unit dan Sasaran Kinerja Organisasi
7. Penerapan Disiplin pegawai berupa ketentuan penggunaan seragam kantor waktu berdin, ketentuan ini tidak terkecuali untuk pegawai dinas seperti penyiar, reporter dan operator teknik baik operator pemancar maupun operator studio.

8. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Dari rencana aksi yang disusun oleh Pokja penguatan peraturan perundang-undangan, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan kepada Karyawan RRI Medan, melalui rapat pleno karyawan maupun Zoom Meeting dari Kantor Pusat.
2. Melakukan pendokumentasian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dengan cara diumumkan di WA group Manajemen, WA Group Struktural dan WA group karyawan RRI Medan.
3. Melakukan arsip digital terhadap peraturan-peraturan internal maupun perundang-undangan terbaru terkait RRI Medan.
4. Penerapan disiplin dengan memberikan pengumuman aturan-aturan disiplin pegawai, baik berupa *punishment* maupun *reward* kepada karyawan.

9. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Dari rencana aksi yang disusun oleh Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Membuat SOP tentang Standar Pelayanan Prima kepada Masyarakat yang berkunjung ke RRI Medan.

1. Memberikan pelayanan kepada kampus/universitas dan sekolah SMA, SMP, SD, dan TK yang berkunjung yang ingin mengetahui lebih dekat tentang RRI Medan beserta program unggulannya berupa pemberian fasilitas narasumber, tempat pertemuan, sound system dan lainnya.
2. Penyediaan Wifi Internet gratis kepada pengunjung / tamu RRI Medan

3. Mensosialisasikan kepada pegawai pentingnya menerapkan budaya ASN BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan RRI Medan kepada masyarakat dan stakeholder.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa penerapan Reformasi Birokrasi terkait delapan Area Perubahan di lingkungan LPP RRI Medan sudah terlaksana semua ke depan tinggal meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi agar lebih masif lagi dan berdampak pada masyarakat yang menjadi target layanan LPP RRI Medan.

2. Jangkauan Siaran Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Siaran RRI

a. Jangkauan Siaran

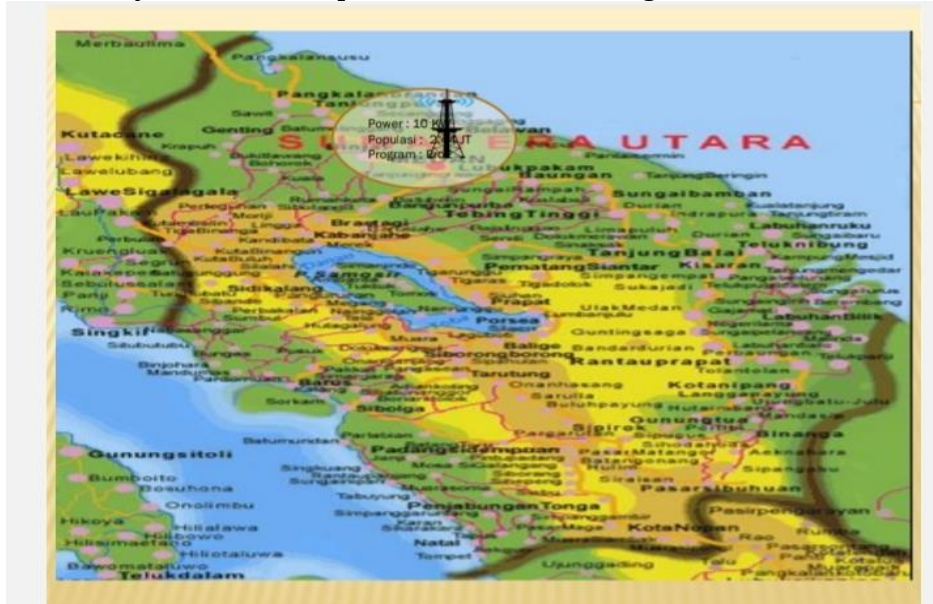
Jangkauan siaran meliputi:

a.1 Programa.1: Menjangkau seluruh wilayah Kota Medan Kota ,Kab Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai,Kota Tebing Tinggi,Kabupaten Asahan,Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kota Siantar,Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Toba Samosir.



Gambar 3. 2 Jangkauan Siaran Programa 1 94.3 FM

- a.2 Program 2: Menjangkau daerah Kota Medan dan sekitarnya, untuk wilayah barat Kota Binjai sampai ke daerah Nomoukur dan sekitarnya, wilayah utara di Kec. Medan Labuhan, Karang Gading Deli dan sekitarnya, untuk wilayah timur meliputi Kec. Sokaraja sampai Kec. Medan Timur, Medan Amplas dan wilayah selatan sampai Kec. Medan Tuntungan dan Medan Johor



Gambar 3. 3 Jangkauan Siaran Program 2 92.4 FM

- a.3 Program 4 Menjangkau daerah meliputi. Kota Medan sekitarnya untuk wilayah barat Diski, Pelumpang dan sekitarnya wilayah utara, Pelabuhan Belawan, Hamparan Perak dan sekitarnya, Timur Medan Tembung dan sekitarnya, selatan Pancurbatu dan Namorih sekitarnya



Gambar 3. 4 Jangkauan Siaran Program 4 88.4 FM

Terkait jangkauan siaran LPP RRI Medan dengan target 89 % dari luas wilayah layanan jangkauan siaran LPP RRI Medan dapat dilihat dari gambar di atas yang di ambil dari aplikasi Noutel untuk pemantauan jangkauan siaran radio dan dapat disimpulkan bahwa target 89 % tersebut tidak tercapai, ke depan tinggal area-area blank spot yang belum terjangkau siaran RRI Medan segera di tambah lokasi titik pemancar dan stasiun relay agar masyarakat wilayah Sumatera Utara dapat mengakses dan terlayani siaran RRI.

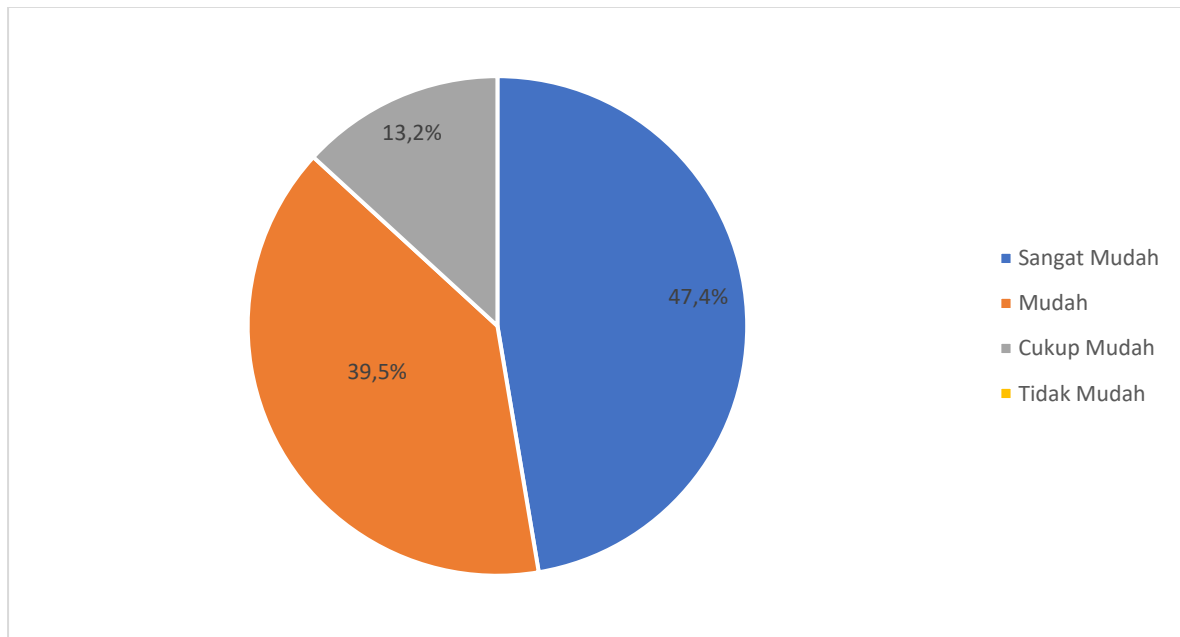
b. Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Siaran RRI

b.1 Konten Siaran secara Terrestrial

- Kepuasan masyarakat mendengarkan siaran radio terrestrial baik melalui programa 1 dan programa 2 dapat dilihat dari hasil survey yang telah dilaksanakan pada grafik dibawah ini :

Bagaimana menurut saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di RRI Medan

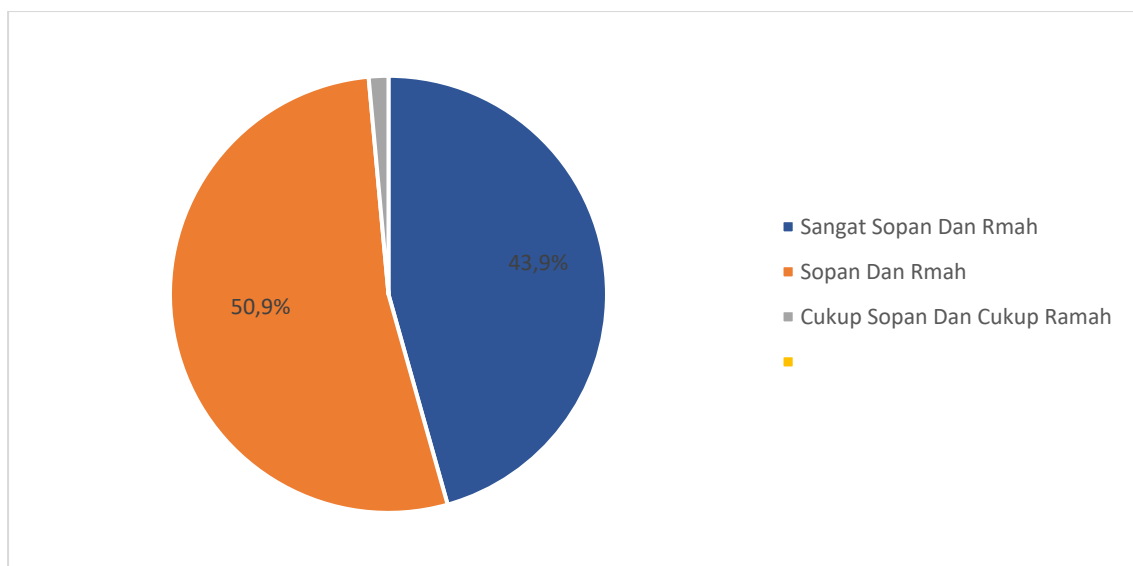
144 Jawaban



Gambar 3. 5 Pelayanan RRI Medan

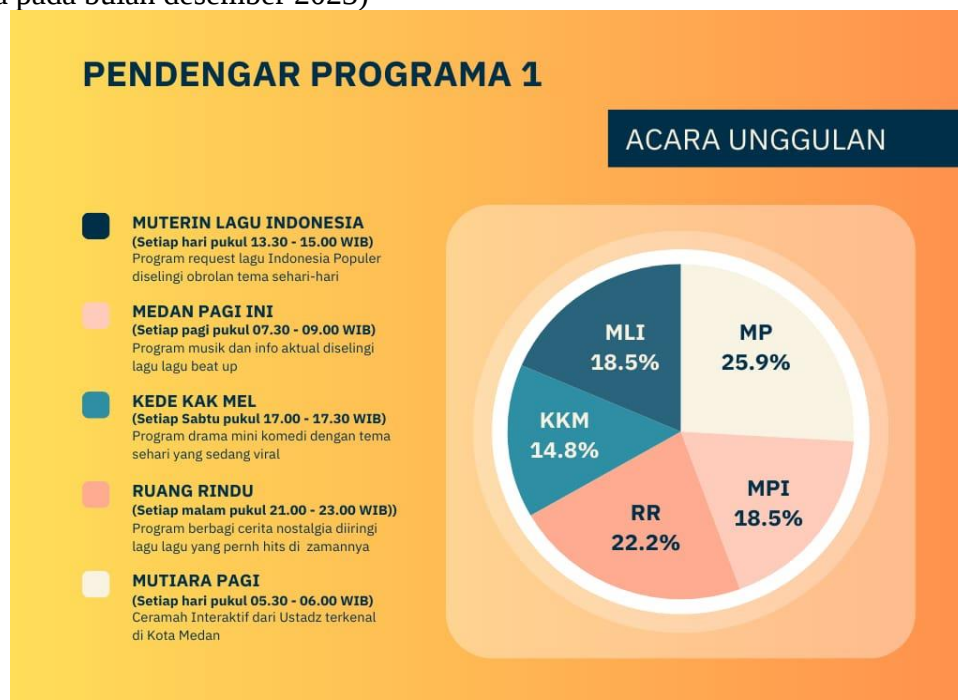
Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?

114 Jawaban



Gambar 3. 6 Keramahan Petugas dalam Melayani

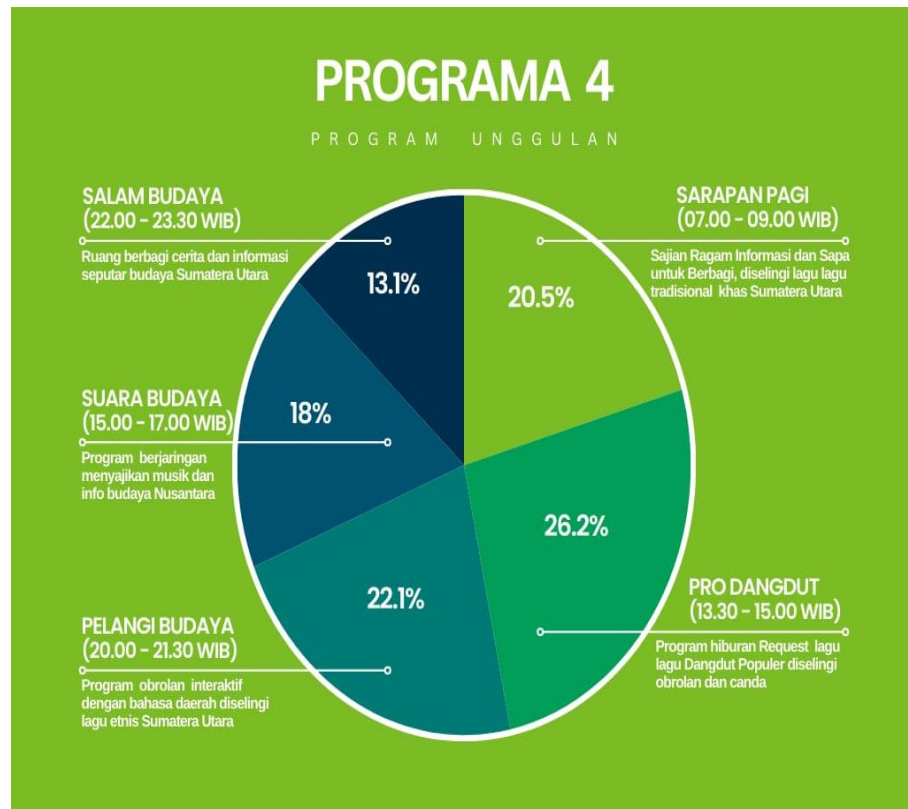
b.2. Berdasarkan pendengar acara setiap Program unggulan yang ada pada RRI Medan: (data pada bulan desember 2023)



Gambar 3. 7 Acara Program 1



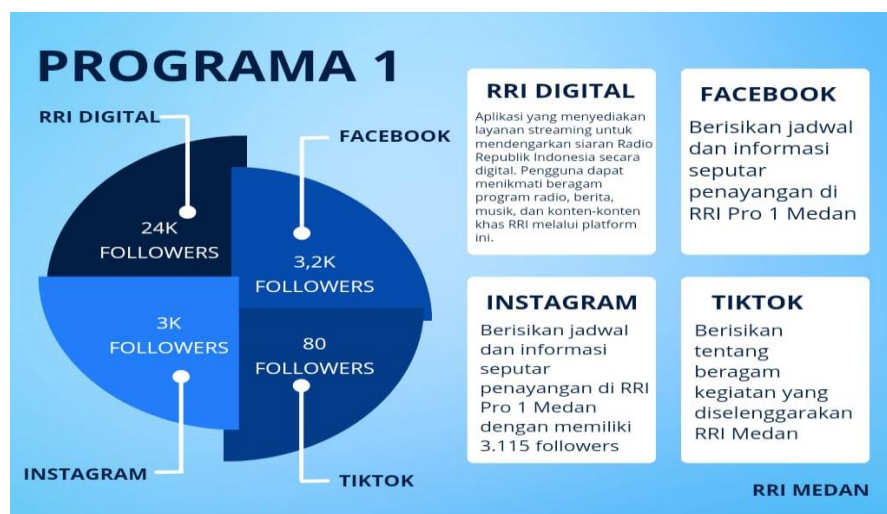
Gambar 3. 8 Acara Program 2



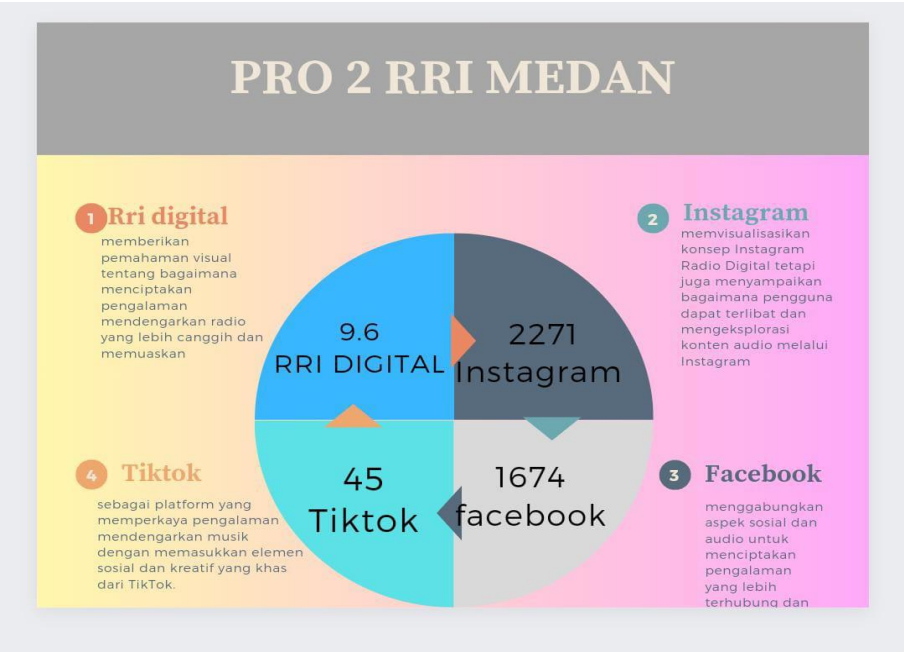
Gambar 3.9 Acara Programa 4

b.3 Konten siaran secara Digital

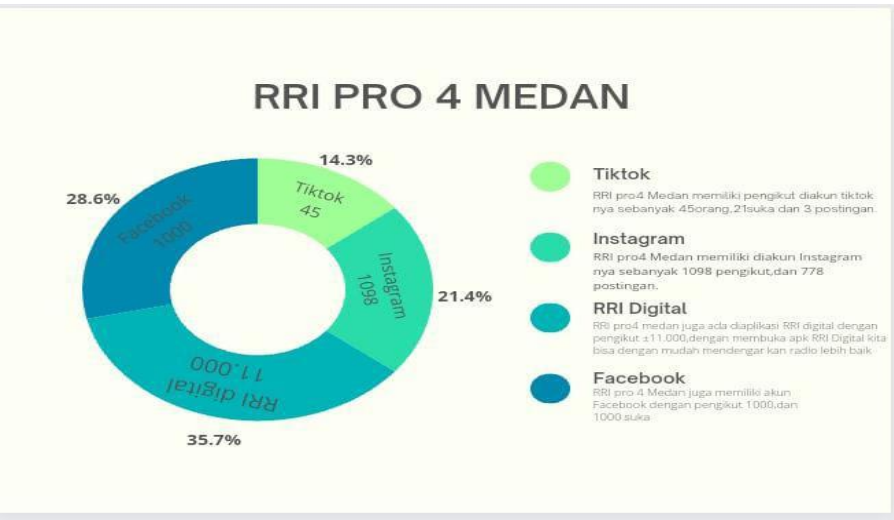
Masyarakat juga dapat mendengar, berinteraksi dan mengikuti program RRI di Mutiplatform yaitu RRI DIGITAL, dimana Informasi Hiburan dan Pendidikan dapat diakses digadget pendengar tanpa harus mencari frekuensi radio. Berdasarkan Followers/pengikut RRI Medan di RRI Digital dan Media Sosial (Face Book, Instagram, Tiktok) ;



Gambar 4.0 Follower Programa 1 di RRI Digital dan Media Sosial



Gambar 4.1 Follower Programa 2 di RRI Digital dan Media Sosial



Gambar 4.2 Follower Programa 4 di RRI Digital dan Media Sosial

c. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

- Keluhan pendengar siaran RRI Medan yang tidak dapat didengarkan beberapa kali dan langsung ditindaklanjuti Tim TMB. terselesaikan dengan baik.

d. Sosialisasi Branding dan Pemanfaatan Stakeholder

d1. Sosialisasi branding dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

- Memanfaatkan setiap momen – momen pertemuan dengan mitra kerja
- Promosi melalui siaran radio berupa: Spot Iklan, Adlibs, dan Pengumuman
- Promosi di setiap event yang berlangsung di kota Medan, yang diselenggarakan oleh Instansi lain
- Sosialisasi promo melalui: E-Flayer, Promo Audio Visual via media Sosial (Grup WhatsApp, Instagram dan Facebook)

d.2 Pemanfaatan Stakeholder meliputi:

Tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh budaya, pelajar, mahasiswa, kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok / komunitas lainnya. Dibuktikan dengan daftar hadir narasumber dalam dialog maupun program – program yang melibatkan stakeholder.

3. Jumlah Pendapatan PNB (LPU)

Berikut Pendapatan PNB pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan pendapatan PNB pada tahun 2020 s.d 2022 , maka data dapat dilihat pada Table dibawah ini:

BULAN	REALISASI PNB 2020	REALISASI PNB 2021	REALISASI PNB 2022	REALISASI PNB 2023
JANUARI	6.000.000			9.000.000
FEBRUARI	9.500.000	6.000.000	6.000.000	11.500.000
MARET	12.000.000	6.000.000	21.000.000	50.460.000
APRIL	14.200.000	87.581.000	43.933.495	11.000.000
MEI	35.900.000	17.400.000	45.794.250	36.050.000
JUNI	47.450.000	46.750.000	18.000.000	21.900.000
JULI	45.000.000	28.400.000	11.500.000	10.950.000
AGUSTUS	142.368.000	30.900.000	9.000.000	34.950.000
SEPTEMBER	17.100.000	410.666.240	9.000.000	15.475.000
OKTOBER	27.080.000	11.100.000	1.025.264.000	12.000.000
NOVEMBER	26.046.700	10.390.000	25.900.000	14.980.000
DESEMBER	146.120.000	37.500.000	47.710.000	49.420.000
TOTAL	528.764.700	698.797.240,-	1.263.101.754,-	278.285.000
Target Tahunan		500.000.000,-	1.737.950.000,-	840.140.000

Tabel 3. 2 Jumlah Pendapatan PNB LPU

Pendapatan PNBPN pada tahun 2022 dengan capaian Rp 1.263.101.754,-,- mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp. 698.797.240,-,- dikarenakan kondisi pandemi yang mulai membaik sehingga aktivitas di masyarakat juga mulai meningkat, selain itu pada Tahun 2022 terdapat pendapatan dari penggunaan sarana prasarana sesuai dengan Tusi..Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan pada pendapatan PNBPN dimana target yang ditetapkan adalah Rp 840.140.000 dan PNBPN yang dicapai hanya Rp 278.285.000 jika di presentasikan pendapatan PNBPN hanya 33.12% hal ini disebabkan karna beberapa hal yaitu :

1. Untuk lintas sectoral karena adanya reconfusing dari anggaran dan anggaran mitra tidak untuk anggaran PNBPN.
2. Alokasi anggaran dari pihak swasta untuk kerjasama PNBPN tidak sesuai dengan rate harga yang ditawarkan
3. Kerjasama e-katalog yang saat ini sudah diterapkan pihak Mitra dari swasta salah satu kendala untuk kita bekerjasama.
4. Kurangnya promosi RRI melalui platform digital, seperti media sosial atau *YouTube* (misalnya ketika membuka *Youtube* iklan mengenai RRI Digital belum ada)

Langkah-Langkah Penyelesaian :

1. Lebih meningkat kerjasama lintas sectoral pihak swasta dan mitra kerjasama lainnya untuk peningkatan PNBPN sesuai target yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan promosi melalui media digital platform lain Misal *Geogle x*, *Facebook x* yang ketika membuka *You Tube* muncul iklan tentang RRI

5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Keuangan)

a. Pagu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran menyatakan bahwa pagu anggaran merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja Pemerintah Pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan data dari Satu DJA Kementerian Keuangan terdapat historis Pagu anggaran yang diberikan kepada LPP RRI Medan Tahun 2023. Berikut merupakan tabel atas persebaran perubahan pagu anggaran LPP RRI Medan selama Tahun 2023:

No	Keterangan	Pagu
1.	Pagu Awal	14,414,709,000
2.	Revisi ke-02	13,980,205,000
3.	Revisi ke-03	13,379,544,000
4.	Revisi ke-04	12,285,771,000

Tabel 3. 3 Persebaran Perubahan Pagu Anggaran LPP RRI Medan

Berdasarkan pagu tersebut LPP RRI Medan melaksanakan 3 Kegiatan Utama pada tahun 2023, yaitu:

1. 5136 – Pengelolaan Keuangan LPP RRI dengan output yang diharapkan ialah 5136.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
2. 5143 – Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha dengan outpun yang diharapkan ialah 5143.AEC Kerjasama
3. 5145 – penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal , Regional dengan output yang diharapkan ialah 5145.BMA Data dan Informasi Publik, 5145.BMB Komunikasi Publik, 5145.EAE Layanan Prasarana Internal, dan 5145.QMA Data dan Informasi Publik

Maka dari itu dapat diperoleh data persebaran pembagian anggaran sebagai berikut:

Output	Jenis Belanja (Rp)		
	51 Belanja Pegawai	52 Belanja Barang	53 Belanja Modal
5136.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,418,777,000	2,996,666,000	
5143.AEC Kerjasama		130,163,000	
5145.BMA Data dan Informasi Publik		402,104,000	
5145.QMA Data dan Informasi Publik		47,311,000	
5145.QMA Data dan Informasi Publik		290,750,000	
Total	8,418,777,000	3,866,994,000	
Grand Total			12,285,771,000

Tabel 3. 4 Rincian Pagu Anggaran RRI Medan Tahun 2023

b. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berikut Kami Sajikan Realisasi Anggaran Satker LPP RRI Medan pada Tahun 2023 pada tahun 2022.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RRI MEDAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	700140 RRI MEDAN	PAGU	8,954,549,000	4,687,188,000	836,100,000	0	0	0	0	0	0	14,477,837,000
		REALISASI	8,818,464,175 (98.48%)	4,479,014,689 (95.56%)	827,839,500 (99.01%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,125,318,364 (97.57%)
		SISA	136,084,825	208,173,311	8,260,500	0	0	0	0	0	0	352,518,636
GRAND TOTAL		PAGU	8,954,549,000	4,687,188,000	836,100,000	0	0	0	0	0	0	14,477,837,000
		REALISASI	8,818,464,175 (98.48%)	4,479,014,689 (95.56%)	827,839,500 (99.01%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	14,125,318,364 (97.57%)
		SISA	136,084,825	208,173,311	8,260,500	0	0	0	0	0	0	352,518,636



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RRI MEDAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga		Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	
1	700140 RRI MEDAN	PAGU	8,418,777,000	3,866,994,000	0	0	0	0	0	0	0	12,285,771,000
		REALISASI	8,363,218,899 (99.34%)	3,731,314,744 (96.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,094,533,643 (98.44%)
		SISA	55,558,101	135,679,256	0	0	0	0	0	0	0	191,237,357
GRAND TOTAL		PAGU	8,418,777,000	3,866,994,000	0	0	0	0	0	0	0	12,285,771,000
		REALISASI	8,363,218,899 (99.34%)	3,731,314,744 (96.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	12,094,533,643 (98.44%)
		SISA	55,558,101	135,679,256	0	0	0	0	0	0	0	191,237,357

Gambar 3. 11 Realisasi Belanja Satker tahun 2023

Sumber (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

Pagu Anggaran Tahun 2023 menurun sebanyak Rp. 2,192,066,000 dari tahun sebelumnya, Realiasi Pelaksanaan Anggaran meningkat yang semula 97,57% di tahun 2022 menjadi 98,44% di tahun 2023 berdasarkan grand total pagu realisasi masing-masing tahun anggaran.

c. Kinerja Keuangan

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- Revisi DIPA: 10 persen
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen
- Penyerapan Anggaran: 20 persen
- Belanja Kontraktual: 10 persen
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen
- Dispensasi SPM: 5 persen
- Capaian Output: 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Berikut merupakan Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RRI MEDAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	123	116	700140	RRI MEDAN	Nilai	100.00	84.93	94.46	100.00	100.00	89.66	100.00	98.25	95.91	100%	95.91
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.49	18.89	10.00	10.00	8.97	5.00	24.56			
					Nilai Aspek	92.47				96.82			98.25			

Tabel 3. 5 Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2. E-Monev Bappenas

Pemantauan dan pelaporan merupakan dua aktivitas berbeda yang saling terkait dan memainkan peranan penting dalam pengendalian pembangunan. Pemantauan dan pelaporan mendorong perencanaan yang berkualitas diimplementasikan dengan kualitas yang baik, sehingga intervensi yang direncanakan dan dilaksanakan dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan pelaporannya merupakan sebuah aksi kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan Renja-K/L dalam kerangka pengawalan pelaksanaan Renja-K/L, baik di level makro, meso dan mikro. Pemantauan dan pelaporannya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tidak saja kualitas implementasi rencana namun juga dalam kerangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan khususnya atas intervensi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

Aplikasi e-Monev sebagai media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L merupakan instrumen yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja-K/L maupun RKP. Pendekatan E-Monev dalam kerangka logika adalah sebagai berikut :

Komponen	
1.	Input
2.	Proksi dari proses
Output	
1.	Rincian Output
Outcome	
1.	Indikator Kinerja Kegiatan
2.	Indikator Kinerja Program

Tabel 3. 6 Pendekatan E-Monev dalam kerangka logika

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT
DESEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 116 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
UK. Eselon I: 01 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

NO	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK RII	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
5136.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1	5136.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	2	7		11,415,443,000	11,314,503,375	99.12%	98.50 %
5145.AEC - Kerja sama									
2	5145.AEC.001 Layanan Pengembangan Usaha, Peran Humas dan Branding Satker Daerah	Kesepakatan	1	7		130,163,000	129,792,539	99.72%	96.50 %
5145.BMA - Data dan Informasi Publik									
3	5145.BMA.001 Penunjang Siaran Lokal Regional dan Nasional (Regular)	layanan	1	6		312,950,000	245,885,325	78.57%	82.08 %
4	5145.BMA.U01 Program Siaran Dialog Interaktif didalam Studio	layanan	1	6		4,218,000	4,218,000	100.00%	100.00 %
5	5145.BMA.U02 Program Siaran Dialog Interaktif diluar Studio	layanan	1	6		23,436,000	19,629,000	83.76%	86.00 %
6	5145.BMA.U03 Program Produksi Spot	layanan	1	4		4,100,000	3,670,000	89.51%	86.33 %
7	5145.BMA.U04 Program Produksi Buletin Berita	layanan	1	4		3,744,000	3,744,000	100.00%	100.00 %
8	5145.BMA.U05 Program Siaran Produksi Feature	layanan	1	3		3,024,000	3,024,000	100.00%	100.00 %
9	5145.BMA.U06 Program Produksi Laporan Mendalam	layanan	1	3		2,250,000	2,250,000	100.00%	100.00 %

10 Jan 2024

1/4

Rekap RO Desember (Kumulatif)

NO	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK RII	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
10	5145.BMA.U07 Program Siaran Langsung Reportase	layanan	1	4		6,180,000	5,705,000	92.31%	90.00 %
11	5145.BMA.U08 Program Produksi Majalah Udara	layanan	1	4		2,412,000	2,302,000	95.44%	93.50 %
12	5145.BMA.U10 Program Produksi Sandiwar Radio	layanan	1	4		3,600,000	2,200,000	61.11%	60.67 %
13	5145.BMA.U11 Program Siaran Pergelaran	layanan	1	2		24,784,000	24,784,000	100.00%	100.00 %
14	5145.BMA.U13 Program Produksi Dokumenter	layanan	1	5		4,182,000	3,982,000	95.22%	97.67 %
15	5145.BMA.U14 Program Produksi Kaleidoskop	layanan	1	1		1,500,000	1,497,450	99.83%	99.67 %
16	5145.BMA.U16 Program Produksi Filler	layanan	1	5		3,624,000	3,362,000	92.77%	93.67 %
17	5145.BMA.U17 Program Produksi Report On The Spot (ROS)	layanan	1	4		2,100,000	1,000,000	47.62%	50.50 %
5145.QMA - Data dan Informasi Publik									
18	5145.QMA.002 Gerakan Cerdas Memilih Prioritas Nasional	layanan	1	3		241,240,000	238,453,700	98.85%	98.00 %
19	5145.QMA.003 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	layanan	1	5		47,311,000	38,440,000	81.25%	81.00 %
20	5145.QMA.004 Parlemen Menjawab Prioritas Nasional	layanan	1	2		49,510,000	49,487,000	99.95%	99.00 %

10 Jan 2024

2/4

Rekap RO Desember (Kumulatif)

Gambar 3. 16 Laporan E-Monev Tahun 2023

Terkait dengan target kinerja anggaran bila dilihat dari penjelasan diatas dan data-data kinerja yang dihasilkan, target kinerja keuangan LPP RRI Medan tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian pengelolaan anggaran dari sumber Rupiah Murni dengan target sebesar Rp. 12,285,771,000,- terealisasi Rp. 12,094,533,643,- atau prosentasi capaian sebesar 98,44 %
2. Kinerja pelaksanaan anggaran dari target nilai 95 capaian tahun ini adalah sebesar 95,91.

Dari data di atas dapat disimpulkan capaian target kinerja anggaran di LPP RRI Medan telah melampaui target tahun 2023

BAB IV PENGHARGAAN

Bidang Siaran dan Pemberitaan

1. Stand terbaik HPN EXPO 2023 Sumatera Utara 7 s/d 12 Februari 2023
2. Pemenang Kategori Berita /Jurnalistik Radio dalam Acara KPID SUMUT AWARD
3. Juara II Kategori Mini Drama dengan judul Lain Waktu Pada Kompetisi Swara Kencana Tahun 2023

Bidang TU

1. Terbaik Kedua Kategori Pengelola BMN Yang Produktif Untuk Wilayah Kerja KPKNL Medan
2. Peringkat V Koordinator Pengelola Anggaran Terbaik K/L Tingkat Wilayah Kategori Pagu Kecil

Bidang LPU

1. Terbaik I PPID pelaksana dengan kontribusi informasi publik terbanyak
2. Juara I PTQ Tingkat Nasional

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Medan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik Satker LPP RRI Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Satker LPP RRI Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Satker dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 LPP RRI Medan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 Program/Kegiatan dengan 20 indikator kinerja/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran yang tertuang di dalam perjanjian kinerja memperoleh hasil sebesar 98,44 % dengan predikat Memuaskan, data ini didapat dari hasil pengelolaan kinerja yang di input di Aplikasi Simlakin (Sistem Informasi Laporan Kinerja) yang di buat oleh Kantor Pusat LPP RRI, yang di peruntukkan bagi seluruh satker LPP RRI baik di Pusat maupun di daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yaitu Tahun 2023, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja yang dilakukan pada Tahun 2023.

Secara keseluruhan capaian kinerja LPP RRI Medan memenuhi target yang ditetapkan Dirut, dan bila dibandingkan dengan tahun lalu Capaian Kinerja LPP RRI Medan meningkat dari capaian kinerja 2020 sebesar 92,11 % meningkat menjadi 97,80 % ada kenaikan sebesar 5.69% dengan predikat capaian kinerja adalah “ Memuaskan”. Berdasarkan data diatas terdapat kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan mulai tahun 2020 yaitu pada pendapatan negara bukan pajak yang mengalami kenaikan, pada tahun 2020 PNBPN dengan target 449.248.349 pencapaian PNBPN Rp 72.000.000, tahun 2021 PNBPN dengan Target Rp500.000.000,- pencapaian PNBPN Rp 698.797.240 mendapatkan peningkatan Rp 198.797.240,- pada tahun 2022 PNBPN RRI Medan dengan target Rp 1.737.950.000,- pencapaian PNBPN 1.263.101.745,- mendapatkan kekurangan target sejumlah Rp. 474.848.255,- bila dibandingkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan pendapatan PNBPN sejumlah Rp 564.304.505. Hal tersebut disebabkan karena kondisi pandemi yang mulai membaik sehingga aktivitas di masyarakat juga mulai meningkat, selain itu pada Tahun 2022 terdapat pendapatan dari penggunaan sarana prasarana sesuai dengan Tusi. Sedangkan di tahun 2023 terjadi penurunan pencapaian PNBPN dengan target Rp 840.140.000 pencapaian PNBPN Rp 278.285.000 hanya 33.12% dari target yang ditentukan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh karena adanya refofusing dari anggaran dan anggaran mitra tidak untuk anggaran PNBPN.

Secara keseluruhan bila dilihat dari target PNBPN yang telah ditetapkan, PNBPN LPP RRI Medan baik tahun 2020 maupun 2023 masih jauh dari target. Kedepan kinerja yang belum optimal terkait dengan anggaran, perencanaan kinerja dan penganggaran harus dioptimalkan, sehingga penyesuaian (revisi) untuk pelaksanaan beberapa program kegiatan berkurang.

Terkait jangkauan siaran LPP RRI Medan masih adanya daerah Blank spot di wilayah layanan Siaran LPP RRI Medan dikarenakan kontur wilayah yang berbukit dan kemampuan pemancar RRI yang kapasitas jangkauannya kurang.

Langkah kedepan segera dibuat RATL rencana aksi tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerjanya, terkait peningkatan target PNBP LPP RRI Medan berupa rencana aksi:

1.Tantangan Bidang Siaran :

Tantangan:

- SDM di bidang Siaran semakin berkurang sementara profesi penyiar adalah Profesi Keahlian. Untuk menjadikan seseorang mampu menjadi penyiar yang baik membutuhkan waktu yang lama. Sementara utk merekrut penyiar yang sudah profesional membutuhkan biaya yg lebih.

Solusi :

Melakukan perekrutan penyiar melalui pengisi acara, setidaknya calon penyiar sudah memiliki bakat dan kemampuan yang bisa diasah.

Tantangan :

- Seiring perubahan dan tuntutan zaman, saat ini penyiar dituntut untuk memiliki kemampuan yang beragam (multi tasking) untuk itu dibutuhkan pelatihan pelatihan, sementara saat ini 80% tenaga penyiar di RRI Medan berstatus "tenaga kontrak" yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat RRI.

Solusi :

Secara berkala melakukan pendampingan dan pelatihan mandiri.

2.Tantangan Bidang LPU

Tantangan:

- Pendapatan PNBP menurun signifikan

Solusi:

1. Mengoptimalkan peran seksi LPU untuk berkolaborasi dengan stakeholder baik Pemerintah Daerah maupun mitra kerja instansi vertikal dan pihak swasta untuk melakukan sosialisasi program-programnya dan mengiklankan produk-produknya di RRI Medan.
2. Membuat company profil yang mencerminkan kekuatan LPP RRI Medan dan dapat meyakinkan bahwa RRI Medan dapat membantu mempublikasikan program dan produk dari mitra kerja.
3. Menambah personal tenaga marketing dengan melakukan anjab dan ABK dari seksi dan subbag yang kelebihan personal.

3.Tantangan Bidang TMB

Tantangan

- Mengatasi daerah blank spot di beberapa wilayah yang menjadi jangkauan layanan siaran RRI Medan,

Solusi :

1. Mengoptimalkan pemancar yang dimiliki LPP RRI Medan dengan cara melakukan pemeliharaan secara berkala dan memaksimalkan kapasitas Pemancar yang ada.
2. Mengusulkan pengadaan pemancar baru dengan kapasitas yang memadai untuk melayani wilayah - wilayah yang jangkauan siarannya hampir 20 kali lipat dari wilayah Medan.

Tantangan:

- Tranfer konwlage antara pegawai senior dengan junior tidak berjalan

Solusi:

Diharapkan kepada Direktur terkait dan Pusdiklat untuk melakukan gagasan baru berupa E-Library (buku elektronik/buku saku) sehingga semua jenis peralatan teknik dapat dipelajari dengan mudah ketika terjadi kerusakan serta melakukan pendampingan dan pelatihan mandiri

4.Tantangan di Bidang Pemberitaan

Tantangan:

Kurangnya informasi Update dari wilayah kabupaten daerah jangkuan siaran RRI dan luar jangkauan siaran RRI

Solusi:

Melakukan kerjasama dengan wartawan daerah atau merekrut orang didaerah (Cityzen Journalism) kontributor

LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Kegiatan Siaran Pemberitaan LPP RRI Medan

https://drive.google.com/file/d/1YRYlvZ9WX0_rTq_h4jYdOwCLk85RecJL/view?usp=sharing

Lampiran 2

Laporan Kegiatan Gerakan Cerdas Memilih I-IV

https://drive.google.com/drive/folders/1GmMMhYKee6keu8_MmwNClW94SnaQlHk?usp=sharing

Lampiran 3

Penghargaan LPP RRI Medan Tahun 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1Tazn3gHiaHl2Mi4Tlq93wLE610nohNu?usp=sharing>

